

112
Pik 32/00
Klin
P

SKRIPSI

1. HUKUM TETAPAN DAN PERUBAHAN
2. CACAT TETAPAN HUKUM

Rofiqotul Khoirot

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

(Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)

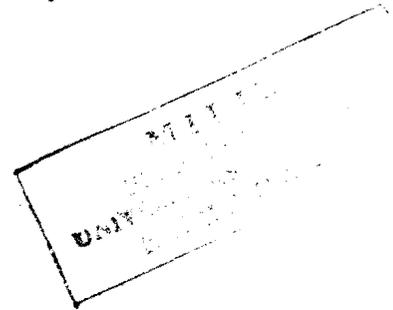
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing,

Handwritten signature of HJ. Romlah Sartono, S.H., M.S.

HJ. ROMLAH SARTONO, S.H.,M.S.
NIP. 130.359.289

Penulis,

Handwritten signature of Rofiqotul Khoirot.

ROFIQOTUL KHOIROT
NIM. 039614447

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

Dari uraian skripsi diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dan hal-hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah. Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu diubah dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara dan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan kelembagaan negara hal-hal yang perlu diubah adalah yang berkaitan dengan :

1. utusan golongan yang duduk dalam MPR, terutama yang berasal dari golongan TNI/POLRI tidak perlu lagi ikut berkiprah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode yang akan datang, karena dapat mengganggu profesionalisme Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melindungi bangsa dan negara,
2. ketentuan yang mengharuskan presiden adalah orang Indonesia asli, sebaiknya dihapus karena tidak sesuai dengan pembangunan bangsa dewasa ini, melanggar hak asasi manusia dan kiranya sulit mencari orang asli dalam konteks Antropologi Biologi, serta tidak sesuai lagi dengan National and Character Building.

3. Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya dihapus karena tidak mempunyai kewenangan lain selain menjadi penasihat belaka,
 4. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, kewenangannya harus dibatasi dengan Undang-Undang,
 5. Untuk mewujudkan dan menegakkan negara hukum, Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung harus diberi wewenang Menguji secara materiil produk undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif, bukan hanya produk dibawah undang-undang,
- b. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara hukum, negara harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menjamin hak-hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aturan dasar yang tertinggi dalam negara.

2. Saran

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wadah penjelmaan rakyat, hendaknya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kehendak rakyat, bukan atas kehendaknya sendiri, mengingat bahwa perkembangan yang terjadi pada bangsa Indonesia menuntut adanya Undang-

Undang Dasar yang fleksibel dan dapat menampung aspirasi seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan -kepentingan partainya atau golongannya sendiri.

- b. Hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan warganegara yang sifatnya mendesak, seperti hak anti diskriminasi, perlindungan terhadap hak-hak anak dan jaminan penegakan hak asasi warganegara, hendaknya segera dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, mengingat masyarakat Indonesia ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.